

ABSTRAK

Judul: Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Kasus Nomor 87/Pid.B/LH/2023/PN Ngb)
Nama Peneliti: Ronaldo Liu
NIM: 22310182

Penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup merupakan salah satu upaya untuk menjamin kelestarian lingkungan serta memberikan kepastian hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Dalam praktiknya, masih terdapat perbedaan pertimbangan hukum di setiap tingkat peradilan, sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 87/Pid.B/LH/2023/PN Ngb yang menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, sedangkan Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 6031 K/Pid.Sus-LH/2024 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 1109 PK/Pid.Sus-LH/2025 menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara sanksi administratif dan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum serta menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan tersebut dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Nanga Bulik berpendapat perbuatan terdakwa bukan suatu perbuatan pidana melainkan pelanggaran administratif sehingga menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Sebaliknya, Mahkamah Agung dan Peninjauan Kembali menilai unsur pidana terbukti sehingga tidak berlakunya sanksi administratif dan terbuktinya penerapan pidana yang diutamakan sehingga terdakwa di putus pemidanaan. Perbedaan putusan tersebut menunjukkan bahwa penafsiran terhadap norma hukum sangat memengaruhi penerapan sanksi pidana dalam perkara lingkungan hidup. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar aparat penegak hukum memiliki kesamaan pemahaman dalam menerapkan ketentuan hukum lingkungan hidup sehingga tercipta kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan hutan serta memperkuat koordinasi antarinstansi dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana lingkungan hidup.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Kawasan Hutan, Putusan Hakim, Mahkamah Agung.*

ABSTRACT

Title: Description of Law Enforcement Against Environmental Crime Offenders (Case Study of Decision Number 87/Pid.B/LH/2023/PN Ngb)

Researcher: Ronaldo Liu

Student ID: 22310182

Law enforcement against environmental crimes is one of the essential efforts to ensure environmental sustainability and provide legal certainty for every violation committed. In practice, however, differences in legal reasoning still occur at various levels of the judiciary, as reflected in the Decision of the Nanga Bulik District Court Number 87/Pid.B/LH/2023/PN Ngb, which acquitted the defendant from all legal charges (*onslag van alle rechtsvervolging*). In contrast, the Supreme Court, through Decision Number 6031 K/Pid.Sus-LH/2024 and the Judicial Review Decision Number 1109 PK/Pid.Sus-LH/2025, declared the defendant legally and convincingly guilty of committing an environmental crime. This discrepancy demonstrates differing interpretations of the legal provisions governing the relationship between administrative sanctions and criminal liability. This study aims to identify the legal considerations of the District Court in rendering an acquittal from all legal charges and to analyze the legal reasoning of the Supreme Court in overturning that decision and imposing criminal sanctions on the defendant in accordance with the applicable laws and regulations. This research employs a normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources collected through library research and analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The results of the study indicate that the Nanga Bulik District Court considered the defendant's actions to constitute an administrative violation rather than a criminal offense, thereby issuing an acquittal from all legal charges. On the other hand, the Supreme Court and the Judicial Review panel concluded that all elements of the criminal offense had been fulfilled, making the application of criminal sanctions appropriate and resulting in the defendant's conviction. The differing decisions demonstrate that the interpretation of legal norms significantly influences the application of criminal sanctions in environmental cases. Based on the findings, it is recommended that law enforcement officers develop a common understanding in applying environmental law provisions to ensure legal certainty, justice, and legal benefit. Furthermore, the government should strengthen supervision over the utilization of forest areas and enhance inter-agency coordination in preventing and enforcing environmental criminal law.

Keywords: *Law Enforcement, Environmental Crime, Forest Area, Judicial Decision, Supreme Cou*